



**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2021
PEMERINTAH
KABUPATEN BANGKA BARAT**

**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2021**

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan rahmat dan ridho-Nya jualah, Perubahan Perjanjian Kinerja Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 dapat disusun sebagai pelaksanaan dari amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun sebagai salah satu komitmen dari Pemerintah Kabupaten Bangka Barat untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan menciptakan tolok ukur kinerja pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik.

Sebagai komitmen untuk mencapai sasaran strategis di Tahun 2021, Perubahan Perjanjian Kinerja didukung oleh sumber daya yang dimiliki serta penganggaran yang telah ditetapkan melalui Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021.

Akhirnya, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa selalu melindungi kita semua dalam melaksanakan pembangunan dan kinerja yang telah diperjanjikan.

Muntok, 8 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1 - 1
1.2. Landasan Hukum.....	1 - 1
1.3. Maksud dan Tujuan.....	1 - 3
1.4. Gambaran Umum Kabupaten Bangka Barat	1 - 4
1.4.1. Kondisi Geografis Daerah	1 - 4
1.4.2. Kondisi Demografi	1 - 6
1.4.3. Kondisi Ekonomi Daerah	1 - 7
1.4.4. Struktur Organisasi Pemerintah Daerah	1 - 13
1.4.5. Sosial Budaya	1 - 17
1.5. Sistematika Penyusunan	1 - 20
BAB II PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA	
2.1. Tema dan Prioritas Pembangunan Tahun 2021.....	2 - 1
2.2. Target Indikator Makro Tahun 2021	2 - 3
2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2021.....	2 - 3
2.4. Target Indikator Tujuan dan Sasaran Tahun 2021	2 - 5
2.5. Perubahan APBD Tahun 2021	2 - 9
BAB III PENUTUP.....	3 - 1
LAMPIRAN	
- PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021	
- PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Tabel 1.2	Jumlah Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat Per Semester I Tahun 2021.....	1 - 6
Tabel 1.3	Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (Persentase)	1 - 8
Tabel 1.4	Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)	1 - 10
Tabel 2.1	Perubahan Target Indikator Makro Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 3
Tabel 2.2	Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 4
Tabel 2.3	Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 5
Tabel 2.4	Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021	2 - 6
Tabel 2.5	Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021	2 - 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Bangka Barat	1 - 5
Gambar 1.2	PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (juta rupiah)	1 - 7
Gambar 1.3	PDRB per Kapita menurut lapangan usaha Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (ribu rupiah).....	1 - 12
Gambar 1.4	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan Kabupaten Bangka Barat per Bulan Oktober Tahun 2021.....	1 - 16
Gambar 1.5	Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Bangka Barat per Bulan Oktober Tahun 2021.....	1 - 16
Gambar 1.6	Angka Partisipasi Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (Persentase)	1 - 17
Gambar 1.7	Angka Harapan Lama Sekolah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (Persentase)	1 - 17
Gambar 1.8	Angka Rata - Rata Lama Sekolah dan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020 (Persentase)	1 - 18
Gambar 1.9	Angka Harapan Hidup Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020	1 - 19
Gambar 1.10	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020.....	1 - 19
Gambar 1.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020	1 - 20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Esensi pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah perwujudan dari implementasi sistem pengendalian manajemen pemerintahan dalam rangka menuju pemerintahan yang baik. Sistem pengendalian ini merupakan instrumen bagi manajemen pemerintahan untuk memastikan bahwa tujuan pemerintahan dapat diwujudkan melalui implementasi strategi pencapaiannya (Program, Kegiatan dan Subkegiatan) yang terencana dan terlaksana dengan baik.

Sebagai salah satu komponen SAKIP, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP, seluruh entitas kinerja diamanatkan untuk menyusun perjanjian kinerja dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi. Melalui perjanjian kinerja, diharapkan dapat menjadi suatu komitmen dalam mencapai tujuan dan sasaran pembangunan berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia serta dapat mendorong keberhasilan peningkatan kinerja instansi pemerintah daerah.

Sehubungan dengan telah ditetapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, maka selanjutnya dilakukan perubahan terhadap Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun anggaran. Tahun 2021 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021. Diharapkan melalui Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2021 ini, dapat menjadi komitmen dan pedoman dalam pelaksanaan pembangunan di Tahun 2021 dengan didukung oleh sumber daya yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat.

1.2 LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 2 Seri D);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 1 Seri D);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 13 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 Nomor 3 Seri A);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 Nomor 2 Seri A).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Maksud penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja adalah menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah. Sementara tujuan penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas, Transparansi, dan Kinerja Aparatur;
2. Sebagai wujud nyata komitmen pemerintah kepada masyarakat; serta
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/ kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

1.4 GAMBARAN UMUM KABUPATEN BANGKA BARAT

1.4.1 Kondisi Geografis Daerah

Kabupaten Bangka Barat merupakan salah satu kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 01 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034, luas wilayah Kabupaten Bangka Barat untuk luas daratan di pulau utama ±284.886,05 ha, luas daratan di pulau-pulau kecil ± 214,85 ha sehingga luas total daratan di Kabupaten Bangka Barat kurang lebih 285.100,90 ha.

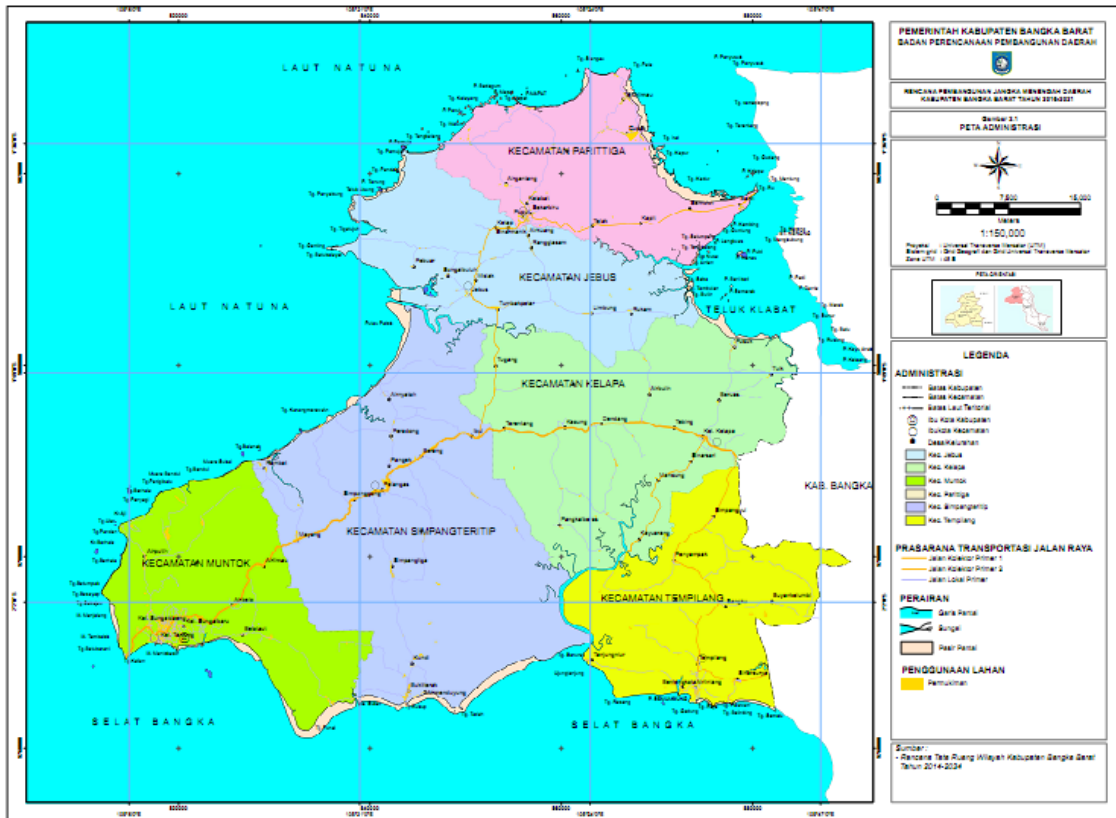
Secara geografis Kabupaten Bangka Barat terletak pada 105°00' – 106°00', Bujur Timur dan 01°00' – 02°10', Lintang Selatan dengan batas-batas wilayah meliputi:

- Sebelah utara berbatasan dengan Laut Natuna;
- Sebelah timur berbatasan dengan Teluk Kelabat, Kecamatan Bakam, Kecamatan Puding Besar, dan Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Selat Bangka; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka.

Kabupaten Bangka Barat merupakan wilayah kepulauan yang memiliki 36 pulau-pulau kecil dengan luasan ± 214,85 ha dan memiliki kawasan pesisir yang cukup luas dengan panjang pantai sebesar 297,38 km.

Peta wilayah administratif Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Peta Wilayah Administratif Kabupaten Bangka Barat



Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034

Kabupaten Bangka Barat terdiri dari 6 (enam) kecamatan, 6 (enam) kelurahan, dan 60 desa. Jumlah kelurahan dan desa di setiap kecamatan relatif seimbang, dimana Kecamatan Kelapa memiliki jumlah desa dan kelurahan yang relatif paling banyak dibanding kecamatan lain.

Secara administratif Pemerintah Kabupaten Bangka Barat memiliki 6 (enam) kelurahan, yaitu Kelurahan Tanjung, Kelurahan Sungai Daeng, Kelurahan Sungai Baru, Kelurahan Keranggan, Kelurahan Menjelang dan Kelurahan Kelapa.

Tabel 1.1
Luas Wilayah dan Persentase Terhadap Luas Kabupaten per Kecamatan di Kabupaten Bangka Barat

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN
1.	Muntok	5 kelurahan, 4 desa	36.795,25	12,92
2.	Simpang Teritip	13 desa	78.447,89	27,54

No.	KECAMATAN	JUMLAH DESA/ KELURAHAN	LUAS WILAYAH (ha)	PERSENTASE TERHADAP LUAS KABUPATEN
3.	Kelapa	1 kelurahan, 13 desa	59.140,76	20,76
4.	Tempilang	9 desa	39.019,21	13,70
5.	Jebus	11 desa	38.811,63	13,62
6.	Parittiga	10 desa	32.671,31	11,47
Total		6 kelurahan, 60 desa	284.886,05	100

Sumber : RTRW Kabupaten Bangka Barat Tahun 2014-2034,
Perda Kabupaten Bangka Barat Nomor 8 Tahun 2018

1.4.2 Kondisi Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangka Barat yang telah terverifikasi oleh Kementerian Dalam Negeri, per Semester I Tahun 2021 jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat adalah 206.006 jiwa. Jumlah tersebut meningkat sebanyak 1.479 jiwa dari jumlah penduduk Tahun 2020 yaitu 204.527 jiwa. Berdasarkan jenis kelamin jumlah penduduk Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 (per Semester I) terdiri dari 106.134 jiwa laki-laki (51,52 persen) dan 99.872 jiwa perempuan (48,48 persen) meningkat dari Tahun 2020 yang terdiri dari 105.382 jiwa laki-laki (51,52 persen) dan 99.145 jiwa perempuan (48,48 persen). Jumlah penduduk per kecamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.2
Jumlah Penduduk per Kecamatan
di Kabupaten Bangka Barat per Semester I Tahun 2021

NO.	KECAMATAN	PENDUDUK		JUMLAH
		L	P	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Muntok	27.096	26.292	53.388
2.	Simpangteritip	15.833	15.104	30.937
3.	Jebus	11.718	10.954	22.672
4.	Kelapa	18.271	16.761	35.032
5.	Tempilang	14.910	13.642	28.552
6.	Parittiga	18.306	17.119	35.425
Total		106.134	99.872	206.006

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bangka Barat, 2021

Masyarakat Kabupaten Bangka Barat merupakan masyarakat yang heterogen. Etnis yang ada mencakup Melayu, Tionghoa, Arab, Jawa, Madura, Bugis, Buton, serta beberapa suku dari daratan Pulau Sumatera. Penduduk Kabupaten Bangka Barat memeluk beberapa agama, antara lain Islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, dan Kong Hu Cu dengan mayoritas penduduk adalah pemeluk agama Islam.

Kegiatan ekonomi penduduk yang dominan di Kabupaten Bangka Barat adalah pada sektor pertanian (subsektor perkebunan) dan sektor pertambangan. Penanganan penduduk usia produktif diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja/kewirausahaan di sektor pertanian dan pertambangan dengan keterkaitan yang kuat dengan sektor ekonomi lainnya.

1.4.3 Kondisi Ekonomi Daerah

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan Pertumbuhan ekonomi (*Economic Growth*) sampai saat ini masih dipakai untuk memantau perkembangan ekonomi suatu daerah yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 1.2
PDRB ADHB dan PDRB ADHK Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 – 2020 (juta rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

1) Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat di pandang sebagai penambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada disuatu wilayah selama kurun waktu setahun. Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya, sebaliknya pertumbuhan yang negative menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya.

Tabel 1.3
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bangka Barat
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2016-2020 (persentase)

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	7,46	-0,21	1,57	-0,18	3,60
B	Pertambangan dan Penggalian	0,65	2,41	0,48	1,41	-13,63
C	Industri Pengolahan	3,35	6,53	6,97	12,08	-7,18
D	Pengadaan Listrik dan Gas	3,11	6,17	8,55	15,06	19,30
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	7,04	7,59	0,01	2,01	7,50
F	Konstruksi	9,14	7,05	7,23	3,85	-1,46
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,80	7,35	4,53	4,28	-6,29
H	Transportasi dan Pergudangan	6,52	7,85	6,54	3,34	-13,37
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,90	5,83	6,54	3,34	-0,65
J	Informasi dan Komunikasi	9,12	8,43	2,80	3,70	18,44
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,38	2,04	10,51	12,55	-0,44
L	Real Estate	6,05	5,05	7,29	1,57	4,91
M,N	Jasa Perusahaan	4,21	4,10	4,49	0,37	-9,11
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	7,48	7,80	8,08	6,08	-0,63
P	Jasa Pendidikan	9,42	9,76	9,12	6,01	-0,76
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	8,08	8,90	7,52	7,37	1,07
R,S,T,U	Jasa lainnya	10,21	7,80	4,13	4,48	-4,69

Kategori	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
	PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	4,80	5,26	5,20	7,08	-5,43

Keterangan : ^r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Pertumbuhan yang positif menggambarkan bahwa perekonomian mengalami kemajuan dibandingkan tahun sebelumnya. Sebaliknya, pertumbuhan yang negative menggambarkan bahwa perekonomian mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Berdasarkan harga konstan, nilai PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 menurun. Hal ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha yang sudah bebas dari pengaruh inflasi. Nilai PDRB atas dasar harga konstan Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 mencapai Rp 10,30 triliun, turun dibandingkan tahun 2019 yang bernilai sebesar Rp 10,89 triliun. Hal tersebut menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi hanya sebesar -5,43%.

Menurut lapangan usaha, pertumbuhan terbesar pada sektor Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 19,30%, selanjutnya Informasi dan Komunikasi sebesar 18,44%, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 7,50% dan Real Estate sebesar 4,91%. Sektor yang mengalami penurunan signifikan di era pandemi Covid-19 yaitu sektor pertambangan dan penggalian dengan penurunan sebesar 13,63%. Selanjutnya, industri pengolahan yang merupakan sektor dengan kontribusi tertinggi mengalami penurunan sebesar 7,18%. Namun yang menarik bahwa sektor pertanian terus tumbuh dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,6%. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan aktivitas masyarakat disektor pertanian selama masa pandemi. Hal ini membuktikan bahwa sektor pertanian memiliki ketahanan yang cukup baik dalam melewati krisis kesehatan yang terjadi di dunia.

Pandemi Covid-19 menyebabkan ekonomi menurun secara agregat. Diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bangka Barat mencapai -5.43%. Adapun beberapa sektor yang mengalami penurunan diantaranya

adalah pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, konstruksi, perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, transportasi dan pergudangan, penyediaan akomodasi dan makan minum, informasi dan komunikasi, jasa perusahaan, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib, jasa pendidikan, jasa lainnya.

2) Struktur Ekonomi

Struktur perekonomian merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk melihat seberapa jauh program dan sasaran yang telah dicapai pada satu periode tertentu. Peranan setiap sektor terhadap PDRB dapat dilihat dari sumbangan yang diberikan oleh masing-masing sektor terhadap pembentukan PDRB setiap tahunnya. Melalui data peranan masing-masing sektor ekonomi terhadap PDRB, dapat dilihat seberapa jauh keberhasilan dari kebijakan yang telah dilakukan. Dengan kata lain, analisis ini dapat digunakan sebagai ukuran kemajuan dan keberhasilan pembangunan suatu daerah.

Tabel 1.4
Kontribusi Lapangan Usaha terhadap PDRB ADHB
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2020 (Persentase)

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^f	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	15,17	14,11	12,06	11,57	13,33
B	Pertambangan dan Penggalian	10,92	10,71	9,48	8,32	7,51
C	Industri Pengolahan	41,94	42,20	44,03	45,35	42,84
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,05	0,06	0,06	0,07	0,09
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
F	Konstruksi	6,29	6,66	7,22	7,51	7,86
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	13,49	14,00	14,55	14,07	14,05
H	Transportasi dan Pergudangan	0,92	0,92	0,96	0,99	0,93
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1,17	1,17	0,96	0,99	1,40
J	Informasi dan Komunikasi	0,30	0,31	1,20	1,26	0,46
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,41	0,40	0,33	0,37	0,47
L	Real Estate	2,02	2,01	2,09	2,09	2,36

KATEGORI	LAPANGAN USAHA	2016	2017	2018 ^r	2019*	2020**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
M,N	Jasa Perusahaan	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,37	4,45	4,52	4,73	5,18
P	Jasa Pendidikan	1,75	1,79	1,82	1,91	2,11
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,74	0,76	0,80	0,85	0,91
R,S,T,U	Jasa lainnya	0,30	0,30	0,31	0,33	0,34
PDRB ADHB		100	100	100	100	100

Keterangan : ^r) angka revisi

*) angka sementara

**) angka sangat sementara

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Selama lima tahun terakhir (2016-2020), struktur perekonomian Kabupaten Bangka Barat didominasi oleh lima kategori lapangan usaha, diantaranya; lapangan usaha Industri Pengolahan; lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan; lapangan usaha Konstruksi; serta lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian. Dilihat dari nilai kontribusi yang dihasilkan, peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bangka Barat pada tahun 2020 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan. Kontribusi yang dihasilkan kategori ini menyumbang sebesar 42,84% terhadap total PDRB ADHB. Selanjutnya, lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor mempunyai peranan sebesar 14,05%; disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 13,33%. Lapangan usaha Konstruksi memiliki peranan sebesar 7,86%. Sedangkan lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mempunyai peranan sebesar 7,51%.

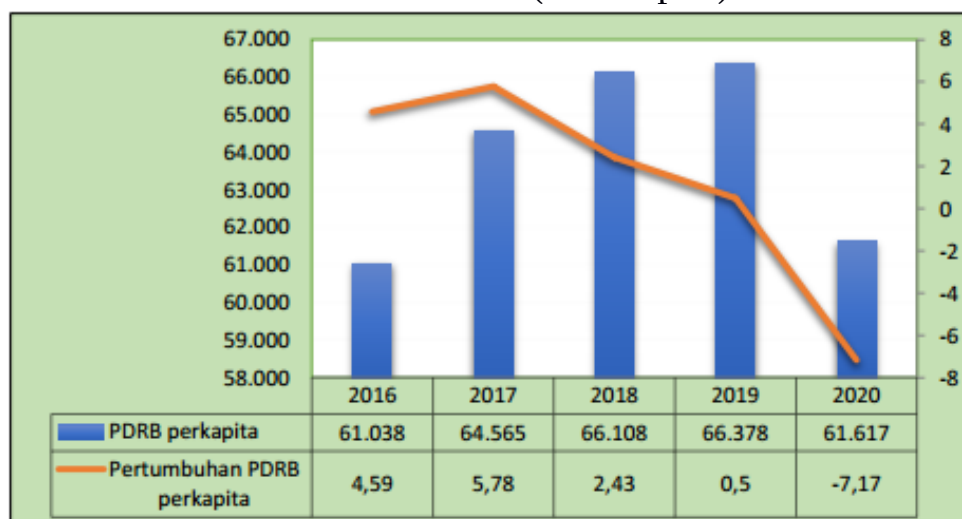
Peranan lapangan usaha Industri Pengolahan cenderung mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 41,94% naik pada tahun 2017 menjadi sebesar 42,20%. Kemudian pada tahun 2018 sebesar 44,03%. Kemudian kembali naik pada tahun 2019 menjadi sebesar 45,35%. Meskipun demikian, tahun 2020 mengalami penurunan dengan nilai kontribusinya sebesar 44,95%. Sementara itu, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan pada tahun 2016-2020 cenderung

menurun. Pada tahun 2016 kontribusinya sebesar 15,17. Kemudian pada tahun 2017 menurun menjadi sebesar 14,11%. Pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan menjadi sebesar 12,06%. Selanjutnya pada tahun 2019 kembali turun menjadi sebesar 11,57%. Salah satu penyebab menurunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah menurunnya produksi beberapa komoditas strategis perkebunan dan rendahnya harga komoditas strategis perkebunan di pasar internasional. Meskipun demikian, peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan dan Perikanan mengalami kenaikan, dimana kontribusinya naik pada tahun 2020 menjadi sebesar 13,33%.

3) PDRB Per kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator makro yang sering digunakan untuk mengukur tingkat perekonomian dan kesejahteraan penduduk di suatu wilayah, yaitu berapa nilai tambah yang dapat dinikmati setiap penduduk secara rata-rata dalam satu tahun. PDRB per kapita diperoleh dengan cara membagi PDRB dengan jumlah penduduk pada suatu daerah, sehingga PDRB per kapita tidak hanya dipengaruhi oleh pertumbuhan PDRB itu sendiri namun juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk.

Gambar 1.3
PDRB per Kapita Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Bangka Barat
Tahun 2016 – 2020 (Ribu Rupiah)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

PDRB per kapita Kabupaten Bangka Barat selama lima tahun terakhir menunjukkan perkembangan yang positif dengan nilai yang terus meningkat setiap tahunnya. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2016—2020), PDRB perkapita di Kabupaten Bangka Barat pertumbuhannya mengalami fluktuatif antara 0,5%—5,78% sampai dengan tahun 2019 dan mengalami penurunan pertumbuhan di tahun 2020 menjadi -7,17%.

1.4.4 Struktur Organisasi Pemerintah Daerah

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, telah dibentuk organisasi perangkat daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat. Sejalan dengan kebutuhan serta evaluasi terkait perangkat daerah, di tahun 2017 dilakukan perubahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 10 Tahun 2017 dan pada tahun 2020 dilakukan perubahan kembali melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 4 Tahun 2020.

Kelembagaan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Barat antara lain sebagai berikut :

- a. Sekretariat Daerah Tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Tipe C;
- c. Inspektorat Daerah Tipe B;
- d. Badan/Dinas Daerah Kabupaten Bangka Barat, terdiri dari :
 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olahraga;
 2. Dinas Kesehatan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan urusan pemerintahan bidang Pertanian;

4. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman, dan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
5. Dinas Pertanian dan Pangan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang pangan;
6. Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal, urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan dan urusan pemerintahan bidang transmigrasi;
7. Dinas Komunikasi dan Informatika Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, urusan pemerintahan bidang persandian dan urusan pemerintahan bidang statistik;
8. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan urusan pemerintahan sub kebakaran;
9. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
10. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
11. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
12. Dinas Lingkungan Hidup Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan urusan pemerintahan bidang kehutanan;
13. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kebudayaan;

14. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan urusan pemerintahan bidang kearsipan;
15. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, dan Perindustrian Tipe B yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, urusan pemerintahan bidang perindustrian dan urusan pemerintahan bidang perdagangan;
16. Dinas Kelautan dan Perikanan Tipe C yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan.

e. Badan Daerah, terdiri dari:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang Keuangan;
2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang keuangan;
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Tipe B yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
4. Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Tipe A yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penelitian dan pengembangan;
5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik;
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah melaksanakan sub urusan bidang bencana (ditetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah).

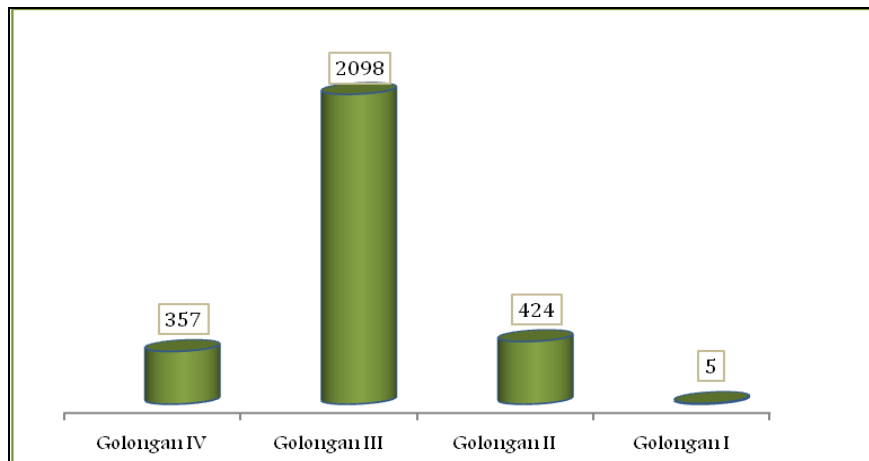
f. Kecamatan terdiri dari:

1. Kecamatan Muntok dengan Tipe A;
2. Kecamatan Simpang Teritip dengan Tipe A;
3. Kecamatan Jebus dengan Tipe A;
4. Kecamatan Parittiga dengan Tipe A;
5. Kecamatan Kelapa dengan Tipe A;
6. Kecamatan Tempilang dengan Tipe A.

Di dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, peningkatan dan penataan fungsi utama pemerintahan, kelembagaan yang efisien dan efektif dengan tata laksana yang jelas dan transparan diawali oleh SDM aparatur yang profesional, berakuntabilitas kepada mitra kerja (*stakeholders*), serta adanya pengawasan secara internal maupun eksternal.

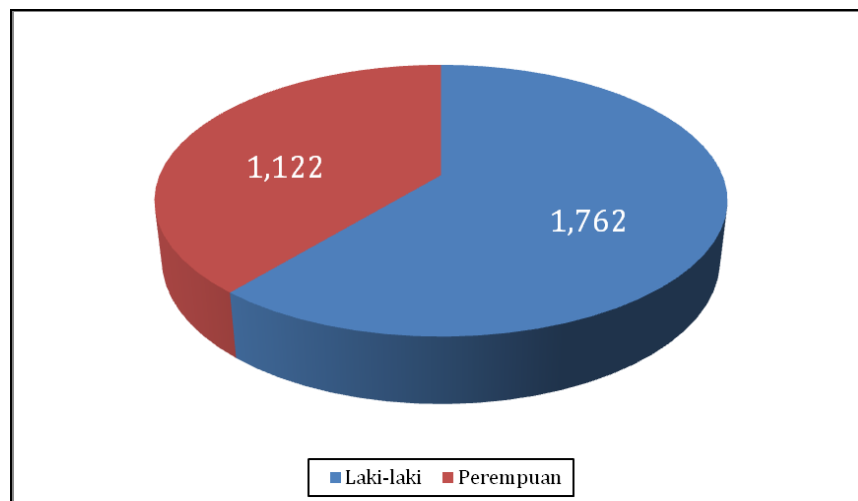
Dalam rangka menunjang pelaksanaan pemerintahan sampai dengan Bulan Oktober 2021 jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Kabupaten Bangka Barat sebanyak 2.884 orang.

Gambar 1.4
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Golongan
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Oktober 2021



Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 1.5
Jumlah Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Jenis Kelamin
Kabupaten Bangka Barat per Bulan Oktober 2021



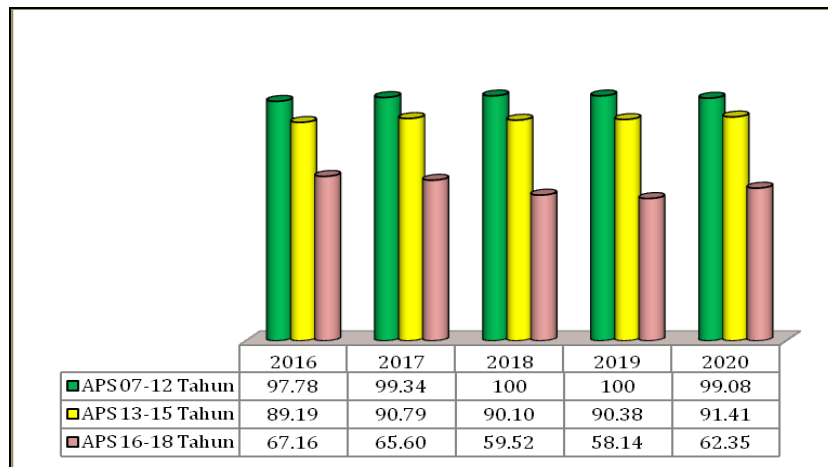
Sumber : BKPSDMD Kabupaten Bangka Barat, 2021

1.4.5 Sosial Budaya

1) Pendidikan

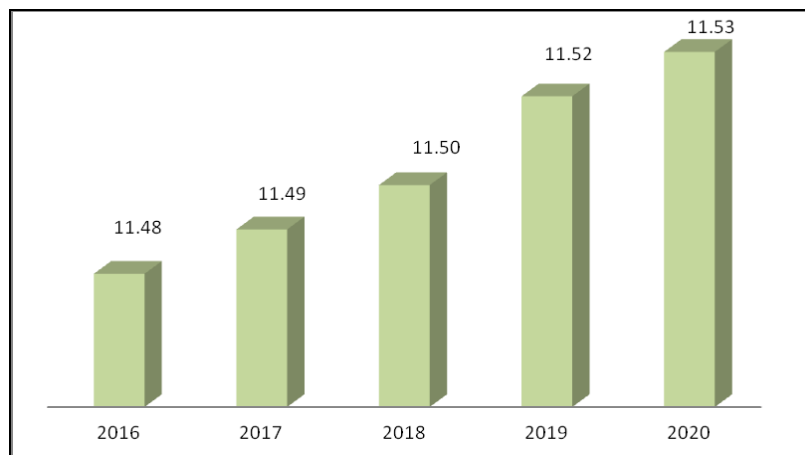
Pemerintah Kabupaten Bangka Barat terus menerus melakukan perbaikan-perbaikan dalam rangka meningkatkan pelayanan urusan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Bangka Barat. Pencapaian kinerja urusan pendidikan di Kabupaten Bangka Barat dapat dilihat dari perkembangan beberapa indikator pendidikan diantaranya yaitu Angka Partisipasi Sekolah, Angka Harapan Lama Sekolah dan Angka Rata-rata Lama Sekolah.

Gambar 1.6
Angka Partisipasi Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (Persentase)



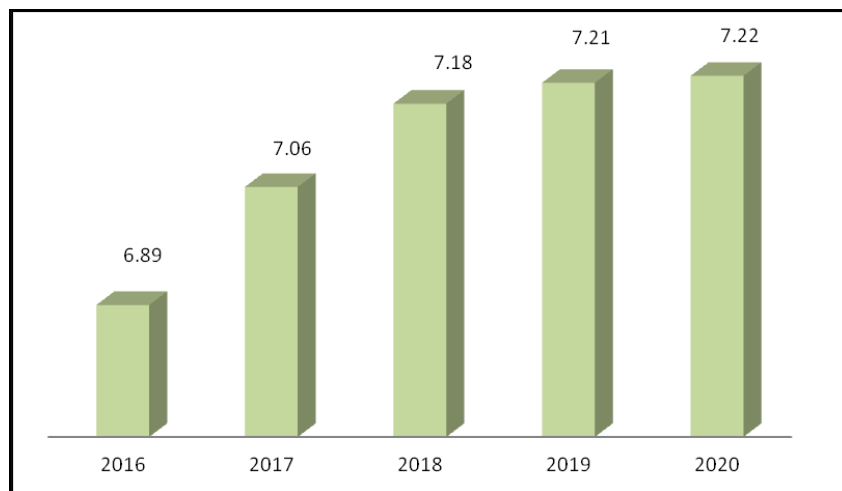
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 1.7
Angka Harapan Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 1.8
Angka Rata - Rata Lama Sekolah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (Persentase)



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

2) Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan diarahkan kepada peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui tindakan preventif, promotif, kuratif dan rehabilitatif. Gambaran pembangunan sektor kesehatan di Kabupaten Bangka Barat antara lain dapat dilihat dari perkembangan Angka Harapan Hidup.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan perkiraan jumlah tahun hidup dari individu yang berdiam di suatu wilayah, pada suatu tahun tertentu dan dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya. AHH merupakan salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk secara umum dan untuk mencerminkan derajat kesehatan masyarakat khususnya. AHH yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pengentasan kemiskinan.

Jika dilihat perkembangannya AHH di Kabupaten Bangka Barat terus meningkat dari Tahun 2016 hingga 2020. Hal ini mengindikasikan adanya peningkatan kesejahteraan penduduk dan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Bangka Barat.

Gambar 1.9
Angka Harapan Hidup
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 – 2020 (Tahun)

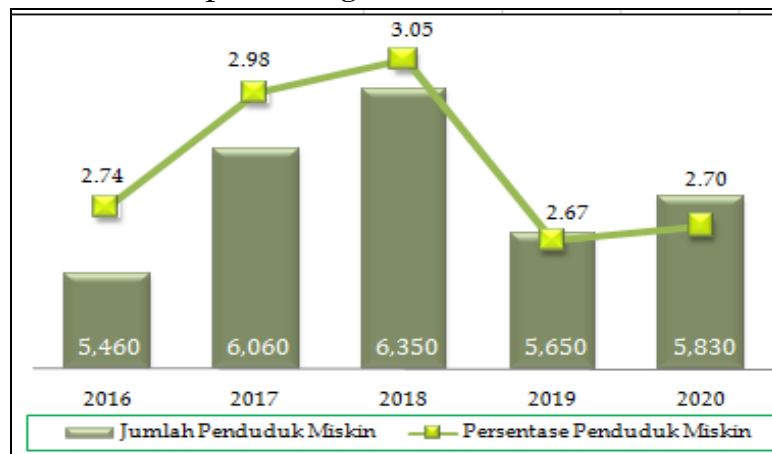


Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

3) Penduduk Miskin

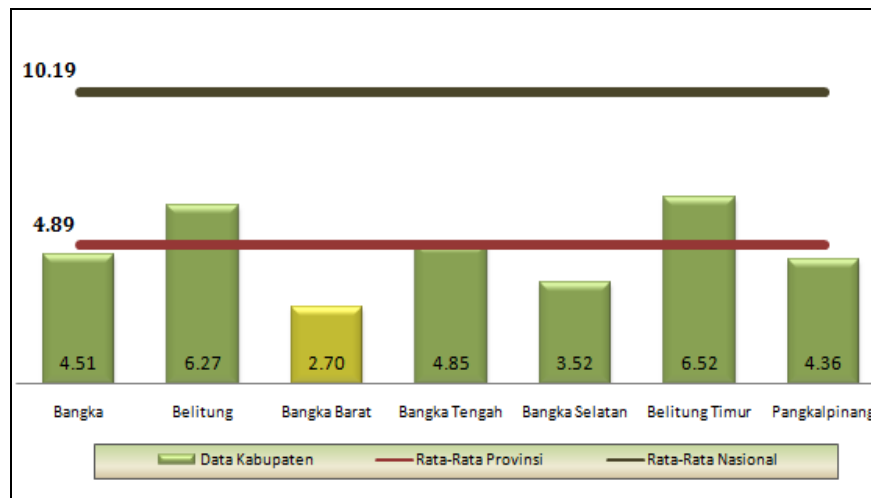
Berdasarkan publikasi dari BPS Kabupaten Bangka Barat, data jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bangka Barat pada Tahun 2020 adalah 5.830 jiwa atau sebesar 2,7%. Jumlah penduduk miskin tersebut meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2019 sebanyak 5.650 jiwa atau sebesar 2,67%. Jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lain dalam Provinsi Kepulauan Bangka Belitung jumlah tersebut paling rendah. Pada Tahun 2020, jumlah penduduk miskin di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu sebanyak 68.400 jiwa atau sebesar 4,53% dan secara nasional jumlah penduduk miskin sebanyak 27.550.000 jiwa atau 9,78%.

Gambar 1.10
Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 - 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Bangka Barat, 2021

Gambar 1.11
Persentase Penduduk Miskin Kabupaten/Kota
di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan Nasional Tahun 2020



Sumber : Badan Pusat Statistik, 2021

1.5 SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Sistematika penyusunan Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan penyusunan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja serta dilengkapi dengan informasi gambaran umum Kabupaten Bangka Barat dan sistematika penyusunan.

BAB II : PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

Menguraikan prioritas dan sasaran pembangunan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat serta target perubahan perjanjian kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

BAB III : PENUTUP

LAMPIRAN

- PERNYATAAN PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021
- PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2021

BAB II

PERENCANAAN STRATEGIS DAN PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 merupakan bagian dari pembangunan tahun terakhir dari pelaksanaan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang disusun dengan memperhatikan ketersediaan sumber daya serta anggaran yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021. Melalui Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 diharapkan dapat meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja pemerintah daerah dalam upaya pencapaian sasaran pembangunan di Tahun 2021.

2.1. TEMA DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2021

Pada Tahun 2021 virus *Corona Viruses Disease 2019* atau Covid-19 masih menjadi pandemi yang berdampak sangat besar pada seluruh dunia termasuk Indonesia. Memasuki Triwulan II, pandemi Covid-19 sampai saat ini masih belum mereda dan bahkan cenderung meningkat di beberapa daerah di Indonesia. Hal ini juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Kabupaten Bangka Barat. Dengan memperhatikan kondisi tersebut, serta menyesuaikan dengan dinamika pembangunan lainnya di Kabupaten Bangka Barat, maka dilakukan revisi terhadap tema pembangunan Tahun 2021.

Sesuai dengan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021, Pemerintah Kabupaten Bangka Barat merevisi Tema pembangunan yang sebelumnya “PERCEPATAN PEMULIHAN DAN PENGUATAN STRUKTUR EKONOMI DAERAH YANG OPTIMAL, BERKELANJUTAN, DAN BERKEADILAN (*GREEN ECONOMY*)” menjadi “PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PENINGKATAN PELAYANAN DASAR DAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PENGGERAK EKONOMI”. Penetapan tema ini tetap memperhatikan RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021, dinamika dan realita kondisi umum daerah, Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021, dan RKPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021.

Berdasarkan tema tersebut maka program/ kegiatan/ subkegiatan strategis Tahun 2021 lebih diarahkan pada upaya-upaya penguatan pelayanan dasar dan menjaga pertumbuhan ekonomi. Fokus belanja lebih diarahkan ke bidang kesehatan dan pemulihan perekonomian. Tema yang sudah ditetapkan tersebut selanjutnya diterjemahkan ke dalam prioritas pembangunan dengan memperhatikan prioritas yang telah ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2016-2021, sasaran pembangunan Tahun 2021 dan permasalahan serta isu strategis yang berhasil di inventarisir pada saat penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2021.

Adapun prioritas pada Perubahan RKPD Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian dan pengembangan agribisnis/ agroindustri secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan nilai tambah hasil produksi pertanian;
2. Pembangunan dan pengembangan infrastruktur guna menopang pertumbuhan ekonomi daerah yang berkeadilan;
3. Peningkatan kualitas pembangunan manusia, pelayanan dasar dan pelayanan publik;
4. Peningkatan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup serta pengendalian pemanfaatan ruang.

Penetapan prioritas kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 berdasarkan beberapa hal, yaitu:

1. Mengakomodir kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi yang belum teranggarkan pada APBD Tahun 2021;
2. Kegiatan Penanganan Covid-19;
3. Pembayaran premi asuransi kesehatan dalam rangka 100% *Universal Health Coverage* (UHC), khususnya untuk masyarakat Kabupaten Bangka Barat yang belum memiliki Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) berupa premi BPJS Kelas III;
5. Kegiatan yang mendukung program-program unggulan yang memiliki keterkaitan dengan pencapaian target sasaran pembangunan daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2021 tetap mengacu pada arah kebijakan RPJMD Tahun 2016-2021.

2.2. TARGET INDIKATOR MAKRO TAHUN 2021

Adapun target indikator makro yang telah ditetapkan pada Perubahan RKPD 2021 setelah memperhatikan capaian indikator makro berdasarkan Laporan Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2020 dan data yang dikeluarkan BPS Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Perubahan Target Indikator Makro
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Indikator Makro	Target 2021	Realisasi 2020	Target Perubahan 2021
1.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,05	5,43	6,91 – 7,44
2.	Indeks Pembangunan Manusia	70,07	69,08	69,27 – 69,42
3.	Tingkat Kemiskinan (%)	3,71	2,70	2,70 – 2,99
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,04	4,12	3,39 – 4,06
5.	Pendapatan Per Kapita (Rp. ribu)	67.136	61.617	67.673 – 68.145

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, perlu disusun suatu kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja pemerintah untuk mewujudkan target kinerja tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki.

Berdasarkan rekomendasi dan masukan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada hasil evaluasi SAKIP Kabupaten Bangka Barat, Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat telah dilakukan perubahan pada tahun 2019 melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 56 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021.

Berdasarkan Perubahan Indikator Kinerja Utama tersebut, telah ditetapkan indikator sasaran pembangunan daerah yang memuat target yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Bangka Barat yang kemudian dijadikan target dalam Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021.

Tabel 2.2.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,91 - 7,44
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27 - 69,42
		Angka Kemiskinan	Persentase	2,70 - 2,99
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,39 - 4,06
		PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	67.673 - 68.145
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persentase	8
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persentase	93
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	Milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Milyar rupiah	4.069,20
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

2.4. TARGET INDIKATOR TUJUAN DAN SASARAN TAHUN 2021

2.4.1. Indikator Tujuan Pembangunan Daerah Tahun 2021

Indikator Tujuan digunakan untuk mengukur kinerja pemerintah daerah yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Target Indikator Tujuan Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

NO.	TUJUAN	INDIKATOR	TARGET
1.	Menguatkan sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	46
2.	Mengembangkan agribisnis/agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	6%
3.	Meningkatkan iklim investasi dan usaha yang kondusif sebagai bagian Kawasan Perhatian Investasi	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	500 Milyar Rupiah
4.	Mengembangkan Usaha mikro, industri kecil, dan menengah	Kontribusi Umi, industri kecil dan menengah terhadap PDRB	9,78%
5.	Mengembangkan pariwisata berkelanjutan untuk menopang pertumbuhan ekonomi	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,2%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	10%
		Persentase benda, situs, benda, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	36%
6.	Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan ekonomi	Indeks Konektivitas Kabupaten	1,25
7.	Meningkatkan Pembangunan Manusia	Indeks Pembangunan Manusia	69,27 – 69,42
8.	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	63,29
9.	Meningkatkan kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap produk hukum penataan ruang dalam mendukung perlindungan lingkungan hidup	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

2.4.2. Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2021

Agar pencapaian pembangunan daerah dapat lebih terarah dan dapat dicapai, maka ditetapkan sasaran pembangunan beserta target indikator pembangunan daerah. Berdasarkan evaluasi hasil capaian RPJMD di Tahun 2020 yang tertuang dalam Laporan Kinerja Pemerintah Daerah Tahun 2020 telah dilakukan perubahan pada beberapa target sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 sesuai dengan Perubahan RKPD Tahun 2021. Berikut dijabarkan target sasaran pembangunan daerah Tahun 2021 beserta perubahannya sesuai dengan perubahan RKPD Tahun 2021.

Tabel 2.4.

Target Indikator Sasaran Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

No.	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	WTP	WTP
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	9%	8%
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	70	70
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	82,73	70
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	80	93
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	85	85
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	2 Juta Rupiah	2 Juta Rupiah
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	4.069,20 Milyar Rupiah	1.000 Milyar Rupiah
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	633.268,73 Juta Rupiah	633.268,73 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	7.520,05 Juta Rupiah	5.000 Juta Rupiah
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	7.982 Juta Rupiah	31.000 Juta Rupiah
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	35.525 Juta Rupiah	35.525 Juta Rupiah

No.	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021
		Nilai produksi ternak unggas	22.934 Juta Rupiah	50.000 Juta Rupiah
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	1,45%	6%
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	4,50%	4,50%
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	100 Milyar Rupiah	500 Milyar Rupiah
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas UMi, Industri Kecil dan Menengah yang mandiri	Persentase peningkatan unit usaha UMi	2%	5,65%
		Persentase peningkatan unit Industri Kecil dan Menengah	5%	5,3%
		Peningkatan Skala usaha UMi	2,5%	2,5%
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri makanan)	3.152,18 Ton/Thn	3.152,18 Ton/Thn
		Kapasitas Usaha Industri Kecil dan Menengah Unggulan (industri kerajinan)	222.492 Unit/Thn	222.492 Unit/Thn
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk UMi, Industri Kecil dan Menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha UMi	150	151
		Jumlah ragam usaha Industri Kecil dan Menengah	54	54
		Jangkauan pasar produk UMi	DK=98,5 % AK=1 % AP=0,5%	DK=98,5 % AK=1 % AP=0,5%
		Jangkauan pasar produk unggulan Industri Kecil dan Menengah	DK=98 % AK=1 % AP=1%	DK=98 % AK=1 % AP=1%
		Kontribusi UMi, Industri Kecil dan Menengah terhadap PDRB	9,78%	9,78%
14.	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan wisata	120.000 orang	100.000 orang
		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	1,2%	1,2%
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	20%	10%

No.	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	42%	36%
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	1,06	1,25
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	94,76%	52%
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat Ujian Nasional se-Provinsi Bangka Belitung	SMP 1	SMP 1
		Angka Harapan Lama Sekolah	13,35	11,54
		Angka Rata-rata Lama Sekolah kabupaten	8,26	7,25
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	69,61 Tahun	70,13 Tahun
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	84,85%	84,85%
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat provinsi	Kejurda 3	POPDA 3
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Persentase desa/ kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/ kelurahan	11%	16%
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak di bidang lingkungan hidup secara aktif	2	12
		Persentase usaha dan/atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan secara baik	70%	24%
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	19%	11%

No.	Sasaran	Indikator	Target RKPD 2021	Target Perubahan RKPD 2021
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	95%	95%
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi terhadap banjir/genangan air	100%	100%
26.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	2%	1%
27.	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah dikonservasi	28%	40%
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	100%	100%
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	2,9%	1,88%

Sumber : Perubahan RKPD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

2.5. PERUBAHAN APBD TAHUN 2021

Dalam rangka memaksimalkan pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 sebagaimana ditetapkan dalam perubahan perjanjian kinerja, didukung oleh program, kegiatan dan subkegiatan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021.

Tabel 2.5
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4-3
4	PENDAPATAN DAERAH	815.004.285.688,00	935.625.834.418	120.621.548.730
4.1	Pendapatan Asli Daerah	74.134.746.118,00	76.804.641.200	2.669.895.082
4.1.01	Pajak Daerah	27.797.500.000,00	27.797.500.000	0,00
4.1.02	Retribusi Daerah	4.815.914.056,00	6.680.334.224	1.864.420.168
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.650.000.000,00	4.856.440.070	206.440.070

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4-3
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	36.871.332.062,00	37.470.366.906	599.034.844
4.2	Pendapatan Transfer	716.030.819.570,00	827.031.808.409	111.000.988.839
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	661.263.328.000,00	756.241.316.839	94.977.988.839
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	24.838.720.000,00	31.789.384.809	6.950.664.809
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	24.838.720.000,00	31.789.384.809	6.950.664.809
5	BELANJA DAERAH	875.343.297.943,00	947.049.036.980	71.705.739.037
5.1	BELANJA OPERASI	659.730.896.768,00	698.443.698.010	38.712.801.242
5.1.01	Belanja Pegawai	350.896.510.009,00	343.272.169.390	(7.624.340.619)
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	271.761.502.651,00	334.412.297.449	62.650.794.798
5.1.05	Belanja Hibah	31.151.615.608,00	18.239.678.671	(12.911.936.937)
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	5.921.268.500,00	2.519.552.500	(3.401.716.000)
5.2	BELANJA MODAL	90.774.154.770,00	130.159.446.168	39.385.291.398
5.2.01	Belanja Modal Tanah	4.504.125.650,00	5.635.362.650	1.131.237.000
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	7.031.020.090,00	35.033.581.275	28.002.561.185
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.171.878.620,00	30.065.594.641	(6.106.283.979)
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	42.901.185.650,00	55.963.920.228	13.062.734.578
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	165.944.760,00	3.460.987.374	3.295.042.614
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	4.850.000.000,00	1.000.000.000	(3.850.000.000)
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	4.850.000.000,00	1.000.000.000	(3.850.000.000)
5.4	BELANJA TRANSFER	119.988.246.405,00	117.445.892.802	(2.542.353.603)
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	3.261.341.405,00	3.446.282.062	184.940.657
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	116.726.905.000,00	113.999.610.740	(2.727.294.260)
Total Surplus/ (Defisit)		(60.339.012.255,00)	(11.423.202.562)	48.915.809.693
6	PEMBIAYAAN DAERAH			
6.1	Penerimaan Pembiayaan	66.339.012.255,00	11.423.202.562	(54.915.809.693)
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (Silpa)	66.239.012.255,00	11.323.202.562	(54.915.809.693)
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	100.000.000,00	100.000.000	0,00

KODE	URAIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ BERKURANG
1	2	3	4	5 = 4-3
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	6.000.000.000,00	0,00	(6.000.000.000,00)
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	6.000.000.000,00	0,00	(6.000.000.000,00)
	PEMBIAYAAN NETO	60.339.012.255,00	11.423.202.562	(48.915.809.693)
	Surplus / Defisit	0,00	0,00	0,00

Sumber : BPKAD Kabupaten Bangka Barat, 2021

BAB III

PENUTUP

Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 merupakan salah satu bagian dalam pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Perjanjian Kinerja merupakan lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan/subkegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Reformasi Nomor 54 tahun 2014, bahwa perjanjian kinerja dapat direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi:

- a. Terjadi pergantian atau mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran); serta
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Perubahan Perjanjian Kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2016, Perubahan RKPd Kabupaten Bangka Barat Tahun 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 28 Tahun 2021 dan Perubahan APBD Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2021 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 7 Tahun 2021.

Melalui kinerja yang diperjanjikan untuk dicapai, diharapkan dapat memperbaiki manajemen pembangunan untuk menuju tata pemerintahan yang baik serta dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Setiap target kinerja akan semaksimal mungkin untuk dicapai melalui sinergitas dan bantuan dari berbagai pihak baik dari elemen pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat juga peran serta pihak swasta dan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Bangka Barat mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkomitmen untuk mewujudkan target kinerja di tahun ini dan perubahan perjanjian kinerja ini akan menjadi tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pemerintah daerah.



PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : H. SUKIRMAN, S.H.

Jabatan : BUPATI BANGKA BARAT

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Muntok, 8 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



H. SUKIRMAN, S.H.

**PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
KABUPATEN BANGKA BARAT**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Satuan	Nilai
1.	Meningkatnya kualitas pembangunan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	Persentase	6,91 - 7,44
		Indeks Pembangunan Manusia	Indeks	69,27 – 69,42
		Angka Kemiskinan	Persentase	2,70 – 2,99
		Tingkat Pengangguran Terbuka	Persentase	3,39 – 4,06
		PDRB Per Kapita	Ribu Rupiah	67.673 – 68.145
2.	Terwujudnya sistem tata kelola pemerintahan daerah yang efektif	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	46
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Opini	WTP
4.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah	Persentase	8
5.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai	70
6.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Indeks	70
7.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	Persentase	93
		Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan publik	Nilai	85
8.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun	Milyar rupiah	100
9.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Milyar rupiah	4.069,20
10.	Meningkatnya Pengelolaan Lingkungan Secara Berkelanjutan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks	63,29

No.	Program	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	436.539.325.773,00
2	Program Pengelolaan Pendidikan	92.684.522.616
3	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105.774.822.981,00
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.478.248.500,00
5	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	202.041.050,00
6	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	510.375.250,00
7	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	7.454.554.810,00
8	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	855.065.000,00
9	Program Penyelenggaraan Jalan	57.567.256.898,00
10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	542.438.880,00
11	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	2.673.933.760,00
12	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	627.767.000,00
13	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	4.413.092.500,00
14	Program Penataan Bangunan Gedung	15.175.263.141,00

No.	Program	Anggaran
15	Program Pengembangan Perumahan	130.000.000,00
16	Program Kawasan Permukiman	2.962.314.000,00
17	Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	186.783.800,00
18	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	2.493.940.500,00
19	Program Penanggulangan Bencana	1.551.998.750,00
20	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	163.960.000,00
21	Program Penanggulangan Bencana	1.173.263.200,00
22	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	1.735.935.250,00
23	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	126.966.680,00
24	Program Pemberdayaan Sosial	630.995.500,00
25	Program Rehabilitasi Sosial	2.305.740.625,00
26	Program Penanganan Bencana	3.349.025.000,00
27	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	246.384.000,00
28	Program Penempatan Tenaga Kerja	14.360.000,00
29	Program Hubungan Industrial	84.705.000,00
30	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	153.173.240,00
31	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100.668.619,00
32	Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	65.221.310,00
33	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	402.318.968,00
34	Program Penanganan Kerawanan Pangan	69.673.775,00
35	Program Pengawasan Keamanan Pangan	108.221.903,00
36	Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan	124.825.000,00
37	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	204.192.850,00
38	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	403.427.510,00
39	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	7.800.000,00
40	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	66.172.900,00
41	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	36.309.900,00
42	Program Pengelolaan Persampahan	6.486.768.190,00
43	Program Pendaftaran Penduduk	194.485.460,00
44	Program Pencatatan Sipil	54.504.500,00
45	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	7.706.950,00
46	Program Pengelolaan Profil Kependudukan	18.657.490,00
47	Program Penataan Desa	30.000.000,00
48	Program Peningkatan Kerjasama Desa	39.070.000,00
49	Program Administrasi Pemerintahan Desa	94.599.800,00
50	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	488.372.500,00

No.	Program	Anggaran
51	Program Pengendalian Penduduk	386.375.660,00
52	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.134.740.420,00
53	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	495.762.364,00
54	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	924.605.000,00
55	Program Informasi dan Komunikasi Publik	1.119.130.300,00
56	Program Aplikasi Informatika	1.440.967.100,00
57	Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	515.120.000,00
58	Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	167.782.000,00
59	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	163.232.000,00
60	Program Pengembangan UMKM	395.277.800,00
61	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	10.000.000,00
62	Program Pelayanan Penanaman Modal	145.365.000,00
63	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	357.241.750,00
64	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	751.408.533,00
65	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1.500.000.000,00
66	Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	150.000.000,00
67	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	199.622.000,00
68	Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	63.908.000,00
69	Program Pengembangan Kebudayaan	689.659.350,00
70	Program Pengembangan Kesenian Tradisional	378.764.600,00
71	Program Pembinaan Sejarah	62.054.360,00
72	Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	264.429.840,00
73	Program Pembinaan Perpustakaan	340.490.640,00
74	Program Pengelolaan Arsip	74.912.950,00
75	Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	68.399.750,00
76	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.632.481.750,00
77	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	597.462.500,00
78	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	1.530.639.358,00
79	Program Pemasaran Pariwisata	338.545.565,00
80	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	776.202.572,00
81	Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	136.965.840,00
82	Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	14.066.800,00
83	Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	84.070.400,00
84	Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	343.580.500,00
85	Program Penyuluhan Pertanian	869.811.580,00
86	Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya	96.700.500,00
87	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	408.996.000,00
88	Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	87.626.200,00
89	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	27.500.000,00

No.	Program	Anggaran
90	Program Pengembangan Kawasan Transmigrasi	113.160.000,00
91	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	6.400.871.012,00
92	Program Perekonomian dan Pembangunan	769.975.070,00
93	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	17.709.293.750,00
94	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1.606.578.420,00
95	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	636.530.090,00
96	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	120.642.155.104,00
97	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.063.626.054,00
98	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	1.305.234.825,00
99	Program Kepegawaian Daerah	930.023.700,00
100	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	1.217.532.780,00
101	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	283.380.890,00
102	Program Penyelenggaraan Pengawasan	1.936.082.000,00
103	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	558.260.000,00
104	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	722.681.460,00
105	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4.527.337.680,00
106	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	2.259.217.080,00
107	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	146.354.846,00
108	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	325.141.760,00
109	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	55.632.920,00
110	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	776.230.408,00
111	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	11.250.000,00
112	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	2.100.000,00
113	Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	197.872.320,00
114	Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	26.133.150,00
115	Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	12.693.400,00
116	Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	81.701.200,00
117	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	176.836.750,00
	TOTAL BELANJA	947.049.036.980,00

Keterangan:

1. Proporsi Dana Alokasi Khusus sebesar 13,88% dari total belanja
2. Proporsi Bantuan Keuangan Provinsi sebesar 0,04% dari total belanja

Muntok, 8 November 2021

BUPATI BANGKA BARAT,



SUKIRMAN S.H.